

## PERAN STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE IFRS*

**Sean Archie Ago Tondombala**

**Hexana Sri Lastanti**

*FEB, Universitas Trisakti*

### **Abstract**

*The objective of this study is to find out the effect of corporate governance structure which is proxied by managerial ownership, institutional ownership, the number of board of commissioner meetings, the number of audit committee meetings, the proportion of independent commissioner and the amount of audit committee to the level of compliance with IFRS mandatory disclosure. The independent variables in this study are managerial ownership, institutional ownership, the number of board of commissioner meetings, the number of audit committee meetings, the proportion of independent commissioners and the amount of audit committee. The dependent variable in this study is the level of compliance with IFRS mandatory disclosure.*

*Samples that used in this study were coal mining company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2011-2013, there are 18 companies choosed with a sampling technique using purposive sampling method. This study uses multiple regression statistical technique (multiple regression model) to test the effect of independent variables on the dependent. The program used for hypothesis testing is SPSS 22.*

*The results of this research indicates that the independent variables which managerial ownership, institutional ownership and the proportion of independent commissioners affect the level of compliance with IFRS mandatory disclosure. While the other independent variables are the number of board of commissioner meetings, the number of audit committee meetings and the amount of audit committee has no effect on the level of compliance with IFRS mandatory disclosure.*

**Keywords:** *The Level of Compliance with IFRS Mandatory Disclosure, Corporate Governance Structure, Managerial Ownership, Institutional Ownership, The Number of Board Meetings, The Number of Audit Committee Meetings, The Proportion of Independent Commissioner and The Amount of Audit Committee.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perusahaan *go public* wajib menyampaikan laporan perusahaannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Perusahaan diharapkan untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya agar dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan *stakeholders*. Dalam upaya mengurangi adanya asimetri informasi, maka perusahaan berusaha untuk mengungkapkan kondisi perusahaannya melalui sebuah laporan perusahaan. Jenis pengungkapan laporan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku secara umum dan diatur oleh pemerintah, yakni Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Di sisi lain pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan secara sukarela dan tidak diwajibkan oleh peraturan tertentu untuk memberikan informasi yang lainnya yang dipandang relevan. Pengungkapan memberikan implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem korporasi. Dengan kata lain, kualitas mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari tingkat keterbukaan atau transparansi (Lins dan Warnock, 2004).

Pada tahun 2008, Indonesia yang terdaftar sebagai anggota *The Group of Twenty* (G20 Forum) telah bersepakat untuk melakukan konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terhadap IFRS secara bertahap. *International Financial Reporting Standard* (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang memuat standar dan praktik internasional mengenai pelaporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan berbasis IFRS diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong buruk dalam penerapan standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham dan juga standar pengungkapan dan transparansi. Sudarmadji dan Sularto (2007) mengungkapkan bahwa rerata tingkat kepatuhan pengungkapan di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sebesar 37%. Terdapat beberapa kasus di Indonesia menjadi bukti bahwa tingkat pengungkapan di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia mengenai ketidakpatuhan dalam pengungkapan laporan keuangan adalah kasus PT Petromine Energy Trading yang merupakan anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk. Terdapat perbedaan transaksi antara PT AKR Corporindo kepada PT Petromine pada laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2010, Perbedaan pencatatan ini terjadi setelah ditemukan dalam laporan keuangan tahunan 2010 AKR Corporindo yang menyebutkan transaksi pembelian bahan bakar senilai Rp 1,37 triliun dari Petromine. Transaksi ini tercatat sebagai pendapatan dalam neraca AKR Corporindo sedangkan dalam laporan keuangan konsolidasi tahunan PT Bakrie & Brothers hanya tercatat beban lain-lain yang nilainya mencapai Rp 8,6 triliun. Akibat kasus ini, BAPEPAM-LK menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada direksi emiten karena yang bersangkutan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, termasuk penyajian, pengungkapan serta kebenaran isi dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (Prianti, 2010). Kasus lain

yang terjadi di Indonesia yaitu kasus yang menyangkut PT Berau Coal Energy yang merupakan anak perusahaan Bumi Plc. Pada tahun 2012 Bumi plc mencatat kerugian sebesar US\$ 2,32 miliar. Kerugian itu disebabkan penyelewengan dana oleh anak usahanya PT Berau Tbk. Bumi Plc mengungkapkan adanya transaksi pada 2011-2012 yang tidak jelas sebesar US\$ 201 juta yang saat itu presiden direktur PT Berau adalah Rosan P Roeslani. Akibat kasus tersebut, Rosan P Roeslani dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan penggelapan dana sebesar hampir Rp 2 triliun. Pada tanggal 26 Juni 2013 pihak Bumi dan PT Berau Coal Energy Tbk mencapai kesepakatan yaitu Rosan P Roeslani sebagai mantan presiden direktur Berau dihukum harus mengganti aset Berau senilai US\$ 173 juta atau Rp 1,71 triliun (Gbrak News, 2014). Dari kedua kasus diatas ditemukan pelanggaran terhadap penyajian informasi secara akurat, disebabkan kegagalan laporan keuangan dalam memenuhi informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam pengungkapan laporan keuangan sehingga dapat merugikan para *stakeholders* dalam melakukan pengambilan keputusan. Praktik *corporate governance* merupakan faktor penting dalam mengungkapkan informasi yang berkualitas.

Praktik *corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan, dimana hasil kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Implementasi *corporate governance* yang baik diharapkan dapat memaksimalkan kualitas dalam pengungkapan dan pelaporan keuangan.

### Perumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
2. Apakah kepemilikan insitusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
3. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
5. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
6. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?

### Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan  
Memberikan info bagi pihak internal dan eksternal perusahaan mengenai penerapan praktik *Corporate Governance* dalam memprediksi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS, serta diharapkan dapat memotivasi perusahaan-perusahaan agar dapat bersaing satu sama lain dalam membuat laporan tahunan secara baik, jelas, dan lengkap sehingga dapat menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.
2. Bagi Investor  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan-keputusan pada saat melakukan investasi.

## 3. Bagi Perguruan Tinggi dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberi tambahan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis dan penelitian-penelitian selanjutnya.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan suatu model kontraktual antara dua orang (pihak) atau lebih, yang menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen suatu usaha) dengan *principal* (pemilik usaha). Teori keagenan muncul karena adanya masalah perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) yang timbul dari konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Salah satu penyebab terjadinya masalah keagenan (*agency problems*) karena adanya informasi asimetris (*asymmetric information*) antara *principal* dan *agent*. Informasi asimetris adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Hendriksen dan Breda (1992: 209) menyatakan bahwa asimetri informasi timbul ketika manajer sebagai agen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa datang sehingga dengan adanya pengungkapan laporan keuangan yang lengkap akan mengurangi asimetri informasi.

### 2. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) atas Konvergensi IFRS

Menurut Ankarath, dkk (2012: 2-7) *International Financial Reporting Standard* (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). IFRS menganut *system fair value based* di mana terdapat kewajiban dalam pencatatan pembukuan mengenai penilaian kembali keakuratan berdasarkan nilai kini atas suatu aset, liabilitas, dan ekuitas.

Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam pelaporan keuangan tahunan, mengandung informasi yang berkualitas tinggi yang transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan, menyediakan titik awal yang memadai.

Pengungkapan laporan keuangan yaitu penyampaian informasi laporan keuangan tentang suatu perusahaan yang mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki, dan laporan pelengkap (Hendriksen dan Breda, 2002: 430). Pengungkapan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas, sedangkan pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) adalah pengungkapan minimum yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2005).

Perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS secara bertahap sejak 2008 hingga 2011. Tahapan tersebut terdiri dari tahap adopsi tahun 2008 hingga

2010, tahap persiapan akhir (2011) dan tahap pengimplementasian PSAK berbasis IFRS serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (Prawinandi, 2012).

### 3. Definisi *Corporate Governance*

Pengertian *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mengambil definisi dari *Cadbury Committe* adalah : “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”. FCGI juga menjelaskan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

### 4. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. (Cadbury dalam *Corporate Governance: A Framework for Implementation*, 2000:4).

Cadbury dalam *Corporate Governance: A Framework for Implementation* (2000:5) juga menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan GCG, yaitu mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar. Mekanisme pengendalian internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal perusahaan seperti kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan jumlah anggota komite audit. Mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian melalui kepemilikan institusional.

### 5. Perumusan Hipotesis

#### a. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-

kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik.

Kepemilikan manajerial menyebabkan berkurangnya tindakan oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, diharapkan manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi yang seluas-luasnya untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Clemente dan Labat (2005) menemukan bahwa adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan sukarela. Manajer yang memiliki saham perusahaan mempunyai insentif lebih besar untuk memaksimalkan kinerjanya, termasuk diantaranya dalam kepatuhan terhadap pengungkapan wajib yang disyaratkan.

***H<sub>1</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS***

**b. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemegang saham luar yang merupakan institusi, lembaga asuransi, bank, dana pensiun. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Eng dan Mak, 2003 dalam Utami, 2012). Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Boediono (2005) dalam Utami (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib. Penelitian yang dilakukan oleh Barako, dkk (2007) menemukan adanya pengaruh antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela.

***H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS***

**c. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS**

Berdasarkan *Corporate Governance Guidelines* (2007) jumlah rapat dewan komisaris adalah jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris dalam satu perusahaan selama setahun. Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik *corporate governance* dengan aturan yang berlaku. Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan

nasihat kepada direksi. Dewan komisaris harus memiliki jadwal pertemuan tetap dan dapat dilakukan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Ettredge, dkk (2010) dewan komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib.

***H<sub>3</sub> : Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS***

**d. Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS**

Komite audit bertugas sebagai fasilitator bagi dewan komisaris untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktik *corporate governance* sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tujuan dari pertemuan komite audit untuk mengevaluasi kinerja dari manajemen serta membahas dan merencanakan tentang strategi perusahaan untuk dapat terus mempertahankan kinerja yang maksimal. Semakin sering komite audit mengadakan pertemuan dipercaya dapat mengurangi dampak terjadinya konflik keagenan. Hal ini berarti pertemuan komite audit dapat memperkuat pengendalian internal dalam perusahaan. KNKG menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan sekali untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Ettredge, dkk (2010) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan wajib.

***H<sub>4</sub> : Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS***

**e. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS**

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-305/BEJ/07-2004 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Muntoro (2005) menjelaskan bahwa komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan dengan makin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin

berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

***H<sub>5</sub> : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.***

**f. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS**

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) menjelaskan bahwa komite audit mempunyai tanggungjawab pada laporan keuangan, *corporate governance* dan pengawasan perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan saran atau pendapat kepada dewan komisaris terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Adanya komite audit dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen dengan cara melakukan pengawasan dan mengawasi laporan keuangan.

Jumlah komite audit disesuaikan dengan organisasi dan tanggungjawab yang diemban. Umumnya jumlah komite audit yang ideal yaitu sebanyak tiga sampai lima anggota. Penelitian yang dilakukan oleh Felo, dkk (2003) dalam Prawinandi (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dimana kualitas tersebut diukur melalui pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Prawinandi (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

***H<sub>6</sub> : Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS***

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menguji hipotesis. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri penghasil bahan baku yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Sampel penelitian dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Dalam rangka menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan teknik statistik regresi berganda (*multiple regression model*).

### **a. Variabel dan Pengukurannya**

#### **1. Variabel Dependen**

Variabel tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS diukur dengan empat standar, yaitu IAS 2 (*Inventories*), IAS 16 (*Plant, Property, and Equipment*), IAS 24 (*Related Party Disclosure*) dan IFRS 6 (*Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*). Item pengungkapan ini dinyatakan dengan Delloitte IFRS *Presentation and Disclosure Checklist*. Delloitte IFRS *Presentation and Disclosure Checklist* merupakan item-item pengungkapan yang dikeluarkan



oleh kantor akuntan publik Delloitte. Pengukuran tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dengan *checklist* tersebut telah digunakan oleh Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010). Item-item yang dipilih dari *checklist* ini disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia yang wajib diterapkan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (*go public*). Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan metode *Dischotomous* atau biasa disebut *Unweighted* yang juga digunakan oleh Prawinandi (2012) dan Utami (2012). Pengukuran tingkat kepatuhan yaitu dengan cara memberikan skor 1 untuk item yang diungkapkan, skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan, NA (*Not Applicable*) pada item yang tidak dapat diterapkan pada perusahaan tersebut (Utami, 2012).

$$MANDIS_{XY} = \frac{\sum Dis_{XY}}{\sum Max_{XY}} \times 100\%$$

MANDIS<sub>XY</sub> = Skor kepatuhan pengungkapan wajib IFRS perusahaan X tahun Y  
 DIS<sub>XY</sub> = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan X pada tahun Y  
 MAX<sub>XY</sub> = Nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan pada tahun Y

## 2. Variabel Independen dan Kontrol

Jenis Variabel	Variabel	Skala Pengukuran	Pengukuran
Independen	Kepemilikan Manajerial	Rasio	Jumlah saham yang dimiliki manajemen / jumlah total saham yang beredar
	Kepemilikan Institusional	Rasio	Jumlah saham yang dimiliki institusi / jumlah total saham yang beredar
	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	Rasio	Jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris dalam setahun
	Jumlah Rapat Komite Audit	Rasio	Jumlah rapat yang dilaksanakan komite audit dalam setahun
Independen	Proporsi Komisaris Independen	Rasio	Jumlah anggota komisaris eksternal/jumlah keseluruhan anggota komisaris
	Jumlah Komite Audit	Rasio	Jumlah keseluruhan anggota komite audit
Kontrol	Leverage	Rasio	DER = Total Hutang / Total ekuitas
	Profitabilitas	Rasio	ROE = Laba bersih / Total Ekuitas
	Tipe Auditor	Nominal	Nilai 1 : diaudit oleh KAP Big 4 Nilai 0 : diaudit oleh KAP non-Big 4

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam industri penghasil bahan baku yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan terdaftar di BEI selama tahun 2011-2013
2. Menerbitkan *annual report* tahun 2011 sampai 2013 dan memberikan informasi lengkap sesuai dengan variabel yang terdapat dalam penelitian ini

Data yang dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan dari pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Trisakti maupun dari situs resmi BEI, yaitu [www.idx.com](http://www.idx.com) dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah suatu data penelitian dengan melakukan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pengolahan dan analisis data menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan SPSS (*Statistical Program for Spesial Science*).

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MANJE	54	.00	65.00	8.0770	18.07706
INSIT	54	.000	88.000	22.60391	24.048000
RDKOM	54	1.0	21.0	5.167	3.8791
RKOMAD	54	3.0	48.0	9.463	8.6738
PKID	54	25.00	66.67	40.3913	8.69690
KOMAD	54	1.0	5.0	3.019	.4552
AUDTR	54	.0	1.0	.574	.4991
LEV	54	-12.510	12.800	1.52965	3.917281
ROE	54	-2.179	.685	-.02614	.603057
MANDIS	54	53.012	73.494	63.27532	4.655908
Valid N (listwise)	54				

### Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam melakukan pengujian regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dan hasilnya menunjukkan bahwa model penelitian ini lolos dari permasalahan asumsi klasik dengan kata lain, semua kriteria uji asumsi klasik sudah terpenuhi.

Hasil pengujian dari uji koefisien determinasi ( $\text{adj. } R^2$ ) menunjukkan bahwa nilai  $\text{adj. } R^2$  yaitu sebesar 0,367 atau 36,7%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 36,7% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol, sisanya yaitu 63,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 4,413 dengan nilai sig.  $0,000 < \alpha 0,05$ . Maka secara bersama-sama seluruh variabel independen dan variabel kontrol yaitu, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Komite Audit, *Leverage*, *Profitabilitas*, dan Tipe Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS.

Model	Unstandardized Coefficients Beta	t	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	49.718	10.527	.000	-
MANJE	0.145	4.268	.000	Ha1 Diterima
INSIT	0.061	2.278	.028	Ha2 Diterima
RDKOM	-0.041	-.207	.837	Ha3 Ditolak
RKOMAD	0.027	.353	.726	Ha4 Ditolak
PKID	0.165	2.220	.032	Ha5 Diterima
KOMAD	1.338	1.139	.261	Ha6 Ditolak
AUDTR	1.095	.900	.373	Tidak berpengaruh
LEV	-0.196	-1.421	.162	Tidak berpengaruh
ROE	1.912	1.660	.104	Tidak berpengaruh
UJI F		sig. 0.000		F 4.413
UJI Koefisien Determinasi ( $\text{Adj. } R^2$ )		Adj. R square 0.367		Std. Error of the Estimate 3.704642
Dependent Variable: MANDIS				

**Hipotesis 1**

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa variabel kepemilikan manajerial mempunyai nilai  $p\text{-value}$  ( $sig.$ ) sebesar  $0,000 < 0.05$ . Maka  $H_{a1}$  diterima yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Utami (2012) yang menemukan bukti bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian oleh Gray, dkk (1998) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen berpengaruh positif terhadap pengungkapan, manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan dengan cara melakukan pengungkapan dengan lebih baik. Menurut Al-Fayoumi, dkk (2010), manajer memiliki insentif yang lemah untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sehingga diperlukan kepemilikan manajerial untuk memotivasi manajer agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Komisaris yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *monitroing* sehingga akan mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Utami, 2012).

**Hipotesis 2**

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai  $p\text{-value}$  ( $sig.$ ) sebesar  $0,028 < 0.05$ . Maka  $H_{a2}$  diterima yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang lebih besar maka pengungkapan wajib IFRS akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Menurut Eng dan Mak (2003) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal tersebut dikarenakan adanya *monitoring* yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standar.

**Hipotesis 3**

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris mempunyai nilai  $p\text{-value}$  ( $sig.$ ) sebesar  $0,837 > 0.05$ . Maka  $H_{a3}$  ditolak yang berarti jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut berarti tinggi atau rendahnya jumlah rapat dewan komisaris selama satu tahun tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan Utami (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini terjadi dimungkinkan karena rapat/pertemuan yang dilakukan dewan komisaris kurang efektif. Menurut Muntoro (2005) hal ini terjadi karena seringkali terdapat seorang atau lebih komisaris yang mendominasi jalannya rapat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan, padahal proses rapat sangat penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris.

#### Hipotesis 4

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa variabel jumlah rapat komite audit mempunyai nilai  $p\text{-value}$  ( $sig.$ ) sebesar  $0,726 > 0.05$ . Maka  $H_{a4}$  ditolak yang berarti jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel jumlah rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Prawinandi (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal tersebut dikarenakan tugas dan tanggung jawab komite audit dalam memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan belum dilaksanakan dengan baik (Suhardjanto dan Dewi, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat indikasi bahwa rapat komite audit hanya bersifat formalitas, terdapat kemungkinan bahwa pertemuan komite audit jarang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pihak manajemen maupun auditor eksternal sehingga masalah-masalah yang terdapat dalam proses pelaporan keuangan tidak terungkap dan tidak diketahui oleh komite audit (Pamudji dan Trihartati, 2010).

#### Hipotesis 5

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa variabel proporsi komisaris independen mempunyai nilai  $p\text{-value}$  ( $sig.$ ) sebesar  $0,032 < 0.05$ . Maka  $H_{a5}$  diterima yang berarti proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi (2012) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan

*mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2005). Menurut Nasution dan Setiawan (2007) adanya pengaruh positif disebabkan karena dengan makin besar proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

### Hipotesis 6

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa variabel jumlah komite audit mempunyai nilai  $p$ -value (*sig.*) sebesar  $0,261 > 0.05$ . Maka  $H_{a6}$  ditolak yang berarti jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Dapat disimpulkan tidak ada pengaruh antara variabel jumlah komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Hal ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan wajib IFRS. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi (2012) yang membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Alasan mendasar yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini bahwa rata-rata jumlah anggota komite audit pada perusahaan sampel sebesar 3 orang komite audit atau dapat dikatakan jumlah anggota komite audit perusahaan masih tergolong rendah sehingga belum mampu mempengaruhi luas pengungkapan wajib IFRS. Adanya kemungkinan bahwa jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

### 1. Simpulan

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 18 perusahaan pertambangan batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini berdasarkan hasil dari uji  $t$  adalah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
- b. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
- c. Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
- d. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
- e. Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
- f. Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

## 2. Implikasi Manajerial

Implikasi hasil dari penelitian ini dapat ditujukan untuk pengembangan teori, manajerial, dan kebijakan seperti berikut ini:

### a. Pengembangan Teori

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa beberapa variabel yang diujikan tidak memiliki hasil pengujian yang sama dengan teori yang telah dipaparkan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut untuk mengamati proksi lain dari struktur *corporate governance*. Dengan demikian, pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dapat dijelaskan pada tingkat yang lebih baik secara ilmiah.

### b. Pengembangan Praktik

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan agar para regulator membuat peraturan yang lebih ketat bagi perusahaan dalam menerapkan struktur *corporate governance* dan setiap perusahaan diharapkan untuk lebih meningkatkan pengungkapan wajib IFRS dan melakukan praktik *corporate governance* dengan lebih baik.

## 3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini mengukur jumlah komite audit berdasarkan total anggota komite audit yang ada didalam perusahaan dan tidak menggunakan pengukuran berdasarkan jumlah anggota komite audit independen sehingga variabel jumlah rapat komite audit dan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ankarath, Nandakumar, Ghosh, T P., Mehta, Kalpesh J., Alkafaji, Yass. (2012). *Memahami IFRS Standar Pelaporan Keuangan Internasional*. Jakarta Barat: PT Indeks Permata Puri Media.
- Al-Fayoumi, N., B. Abuzayed, dan D. Alexander. (2010). "Ownership Structure and Earnings Management in Emerging Markets: The Case of Jordan". *International Research Journal of Finance and Economics*, 38: 28-47.
- Al-Mutawaa, A., dan A. M. Hewaidy. (2010). "Disclosure Level and Compliance with IFRSs: An Empirical Investigation of Quaity Companies". *International Business and Economics Research Journal*, 9 (5): 33-49.
- Barako, D.G. (2007). "Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports". *African Journal of Business Management*, 1(5): 113-128.
- Cadbury, A. (2004). *Corporate Governance: A Framework for Implementation*. London: Gee & Co. Ltd. <http://www.sovereignglobal.com> (diakses 18 November 2014)
- Clemente, A.G. dan B.N. Labat. (2005). "Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure: The Role of Independent Directors in The Boards of Listed Spanish Firms". [http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento\\_16048.pdf](http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento_16048.pdf). (diakses 19 Oktober 2014)

- Corporate Governance Guidelines. (2007). "Aecom Technology Corporation Corporate Governance Guidelines". [http://www.ecgi.org/codes/documents/cg\\_guidelines\\_en.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/cg_guidelines_en.pdf). (diakses 19 Oktober 2014)
- Deloitte Touche Tohmatsu. (2010). "International Financial Reporting Standards. Presentation and Disclosure Checklist 2010". <http://www.iasplus.com/en/publications/global/modelschecklists/2010/ifrs-presentation-and-disclosure-checklist-2010>. (diakses 23 September 2014)
- Eng, L.L. and Mak, Y.T. (2003). "Corporate Governance and Voluntary Disclosure". *Journal of Accounting and Public Policy*, 22: 325-46.
- Ettredge, M., K. Johnstone, M. Stone dan Q. Wang. (2010). "The Effects of Company Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance". *Review of Accounting Studies, Forthcoming*: 1-34.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). "Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance". Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II (2).
- Gbrak News (2014). "Skandal Internasional, Rosan Roeslani Digugat ke Arbitrase". <http://www.gebraknews.com/2014/08/skandal-internasional-rosan-roeslani.html> (diakses 24 Oktober 2014)
- Gray, E and B. JMT. (1998). "Managing Corporate Image and Corporate Reputation". *Long Range Planning*, 31(5): 695-702.
- Hendriksen, Elder S. dan Breda, Michael F.V. (2002). *Teori Akunting*. Edisi Kelima. Buku 2. Jakarta: Interaksa.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. (1976). "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, 3: 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Lins, K.V. dan F.E. Warnock. (2004). "Corporate Governance and the Shareholder Base". *International Finance Discussion Papers* (816).
- Muntoro, R. K. (2005). "Membangun Dewan Komisaris yang Efektif". *Majalah Usahawan Indonesia* No.11 Tahun XXXVI.
- Nasution dan Setiawan. (2007). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia". *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Pamudji, S. dan A. Trihartati. (2010). "Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)". Artikel Universitas Diponegoro Semarang. [ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/176/105](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/176/105). (Diakses 19 Oktober 2014)
- Prawinandi, Wardani. (2012). "Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS". *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*. Universitas Sebelas Maret.
- Prianti, Martina (2014). "Sanksi Rp 3 Miliar Untuk Tiga Perusahaan Grup Bakrie". <http://investasi.kontan.co.id/news/sanksi-rp-3-miliar-untuk-tiga-perusahaan-grup-bakrie-1> (diakses 24 Oktober 2014)



- Sudarmadji, A.M. dan L. Sularto. (2007). "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan". *Proceeding PESAT 2*, Vol. 2.
- Suhardjanto, D. dan A. Dewi. (2011). "Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15 (1): 105-118.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Utami, Wulan Dwi. (2012). "Investigasi Dalam Konvergensi IFRS Di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance". *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*. Universitas Sebelas Maret.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

